

Juli, KEK Batam Diresmikan

MARTUA,
Batam

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjanjikan, satu kawasan ekonomi khusus (KEK) dijanjikan diresmikan di Batam, Juli 2018. Nantinya, Badan Pengusahaan (BP) Batam, akan bertransformasi dengan menjadi Badan Pengelola (BP) KEK. Namun transformasi dilakukan setelah KEK selesai dibentuk. Selain itu, konsep yang ditawarkan juga tidak konsisten, karena saat tanya jawab dengan pengusaha, dijanjikan FTZ tetap ada.

Janji itu disampaikan Darmin, saat mengikuti dialog yang digelar Bank Indonesia (BI), di Batam,

Jumat (15/4).

Diakui, dalam UU 39 tahun 2019 tentang KEK, tidak disebutkan ada lembaga Badan Pengusahaan di dalamnya. Tapi KEK membutuhkan Badan Pengelola. Sehingga BP Batam akan bertransformasi menjadi Badan Pengelola KEK.

"Nanti BP praktis tidak akan ada lagi, ketika transformasi Batam dari FTZ ke KEK rampung. Jika sudah sampai tahap tersebut praktis tidak ada lagi BP Batam, yang ada adalah Badan pengelola KEK Batam," jelasnya.

Ditegaskan, perubahan BP Batam menjadi BP KEK, dilakukan saat seluruh zona KEK di Batam ditransformasi. Sebelum selesai, maka akan ada dua lembaga yang

mengelola FTZ dan KEK. Dimana, FTZ dibawah BP Batam dan KEK dibawah BP KEK. Sementara waktu, kedua lembaga itu dibawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo.

"Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo akan merangkap jabatan menjadi Kepala Badan Pengelola KEK. Saya sudah bicara dengan Gubernur mengenai hal ini," jelasnya.

Dijanjikan, insentif yang diberikan pemerintah di KEK juga lebih menarik ketimbang FTZ. Kawasan FTZ memberi fasilitas bebas bea masuk, PPN dan PPNBm. Sementara di KEK diberikan insentif lain berupa Tax Holiday. Namun kembali ditegaskan, pemerintah tak akan

memaksa industri untuk masuk ke KEK.

"Jika memilih tetap berada di luar KEK akan tetap dipersilahkan. Namun dia mengingatkan agar jangan remburu karena fasilitas di KEK jauh lebih menarik dibanding FTZ. Jadi tolong dibandingkan dulu lebih menarik mana. Tapi tak ada keharusan harus jadi KEK," jelasnya.

Diingatkan, di FTZ tak ada jalan masuk barang ke dalam negeri. Sementara dari Singapura, Malaysia, Thailand hasilnya bisa masuk ke Indonesia kalau lokal kontennya terpenuhi. "Kalau anda di FTZ, barang harus diekspor, sedangkan konsumsinya di sini. Itu yang membuat FTZ jadi tak menarik. Masa barang dari

Singapura boleh, dari Indonesia tak boleh. Makanya lebih bagus diubah jadi KEK," bebemnya mengakhiri.

Sementara Darmin Nasution mengakui, nantinya tak akan lagi menjabat sebagai Dewan Kawasan Batam. Posisi ketua Dewan Kawasan KEK Batam akan dipegang oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun. DK KEK nantinya akan bertugas seperti pengawas dalam kegiatan KEK dan melapor kepada Dewan Nasional KEK.

"Tapi nanti transformasi Batam menjadi KEK, dibuat bertahap," sambungnya.

Zona yang lebih dulu siap menjadi KEK akan segera ditransformasi. Sementara zona lain akan diberikan waktu untuk

mempersiapkan diri sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh pemerintah. "Mana yang siap akan ditransformasi. Mudah-mudahan waktu tidak lama seluruh zona bisa berubah menjadi KEK," imbuh Darmin.

Darmin belum mengungkapkan, daerah KEK pertama di Batam akan diresmikan pada Juli mendatang. "Kita lihat saja nanti, tapi maksimal 3 bulan lagi zona KEK pertama di Batam sudah mulai diresmikan," ujarnya.

Pemerintah akan mencari jalan paling mudah dalam proses transisi FTZ menjadi KEK. KEK Batam akan dimulai dengan zona yang paling siap menjadi KEK. Diharapkan, transformasi FTZ menuju KEK cepat,

dan memberikan insentif yang lebih baik bagi industri. "Sehingga daya saing kawasan Batam akan lebih baik dibanding kawasan lain di ASEAN," janjinya.

Dirilai, KEK memberikan peluang pasar lebih luas dibanding FTZ. Karena industri di KEK bisa menjual barangnya ke pasar-pasar dalam negeri. Sementara industri kawasan FTZ tak dimungkinkan melakukan hal serupa. Apa lagi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Fasilitas MEA memberikan kemungkinan impor barang dari negara Asean ke Indonesia tanpa diberlakukan bea masuk," beber Darmin. Walau KEK selesai dibentuk, FTZ akan tetap ada. ***

isana PENGUNDIAN 15 APRIL 2018

LUCKY DRAW

HADIAN UTAMA

0812 6792 9920 | ISANA Group | isana_mart

Promo **Kuliner**

12/4/18 - 25 April 2018

0812 6792 9920 | ISANA Group | isana_mart

Industri Orientasi Ekspor Dapat Insentif

BATAM - Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati langkah strategis untuk mempercepat pengembangan industri berorientasi ekspor di Batam, Bintan dan Karimun. Pemerintah pusat akan menyediakan insentif bagi industri-industri unggulan berbasis ekspor. Terutama yang melakukan *research and development* (R&D) dan mengembangkan pendidikan vokasi.

Kesepakatan itu menjadi kesimpulan rapat koordinasi pemerintah pusat, daerah dan Bank Indonesia, Jumat (13/4) di Batam. Kesepakatan itu disampaikan Gubernur BI, Agus Martowardojo, bersama Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Gubernur Kepri, Kepala

Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Untuk mempercepat pengembangan industri berorientasi ekspor, maka perlu pengembangan kawasan industri secara menyeluruh. Didukung insentif yang memadai dan infrastruktur yang berkualitas. Penting penyediaan sumber daya manusia yang mampu mengimbangi aplikasi teknologi dan inovasi di manufaktur. Selain itu, perluasan akses pasar melalui perjanjian perdagangan.

"Penting, keterkaitan industri domestik dengan rantai nilai global. Kebijakan yang dikeluarkan, untuk mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor di daerah, melalui



WALIKOTA Batam Rudi dan Kepala BP Batam Lukita saat bersama meninjau di MPP Batam.

pemberian kemudahan perizinan dan insentif fiskal," kata Agus. Kemudahan dimaksud, diambil

melalui percepatan implementasi program online single submission (OSS). (mbb)